



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Joglo Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 09 Mei 2025

Halaman: 1

PENDAPATAN



DOK RUBA GRHA/JOGLO JOGJA

BERBINTANG: Suasana Hotel Ruba Grha pada malam hari.

Tunda Bayar Pajak dan Retribusi Hotel Restoran

YOGYAKARTA, *Joglo Jogja* - Pengajuan relaksasi pajak dan retribusi untuk hotel restoran di Kota Yogyakarta mendapatkan lampu hijau dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. Pemkot hanya memberikan penundaan pembayaran.

■ Baca **TUNDA...** Hal II

Tunda Bayar Pajak dan Retribusi Hotel Restoran

sambungan dari hal Joglo Jogja

“Pajak hotel sebenarnya merupakan pajak yang dipungut dari konsumen, dan tidak langsung dari pengusahanya. Dari kami, mungkin sifatnya hanya penundaan saja. Setelahnya, nanti kita juga lakukan survei di lapangan,” jelas Kepala Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Kisbiyantoro saat diwawancarai wartawan, Kamis (8/5/2025).

Dianengakui, sejak ada Instruksi Presiden (Inpres) No 1 Tahun 2025 tentang efisiensi APBN dan APBD dan perekonomian saat ini yang tengah lesu berdampak langsung terhadap perhotelan. Terutama, hotel berbintang yang okupansinya anjlok.

“Kalau dilihat, sebenarnya masih banyak yang datang ke Yogyakarta. Hanya saja, mungkin menginapnya tidak di hotel bintang. Tapi, hotel-hotel kecil, semacam *homestay* itu,” katanya. Adanya permohonan relak-

sasi tersebut, Kisbiyantoro menegaskan, pihaknya tak menutup mata. BPKAD Kota Yogyakarta tetap akan menindaklanjuti permohonan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Yogyakarta.

“Pasti kami kaji secara mendalam. Saat ini masih terus kita kaji dengan melihat perkembangan ekonomi,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua PHRI DIY, Deddy Pranowo Eryono menyatakan, Inpres No 1 Tahun 2025 benar-benar memukul okupansi hotel di Kota Yogyakarta. Salah satu pos pemasukan dari sektor *meeting, incentive, convention, and exhibition* (MICE) tak bisa diandalkan. Itu lantaran kementerian dan lembaga di pemerintah pusat menunda pelaksanaan MICE di Kota Yogyakarta.

“Sekarang hotel-hotel sudah mulai pengurangan tenaga *casual* dan kontrak kerja. Sudah ada juga pengurangan jam untuk karyawan tetap,” katanya.

Selain efisiensi, kondisi sekarang juga diperparah dengan

menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini juga membuat dunia pariwisata ikut goyah.

Sebagai bukti, menurutnya, okupansi perhotelan di Yogyakarta sepanjang libur panjang lebaran lalu rata-ratanya hanya menyentuh kisaran 65 persen saja. “Puncak keramaiannya cuma di H+2 dan H+3 lebaran. Itu bukan karena tamu bergeser ke Solo, ya, karena ternyata di sana tingkat huniannya juga masih di bawah Yogya,” terangnya.

Kisbiyantoro menyebut, saat ini kondisi semakin *megap-megap*. Industri pariwisata di Yogyakarta membutuhkan perhatian serius dari pemerintah.

Hal yang paling mungkin direalisasikan antara lain yakni relaksasi pajak serta keringanan retribusi PLN dan PDAM. Ini supaya perhotelan bisa memperpanjang hidup.

“*Supplier-supplier* kami, baik bahan pangan atau souvenir, yang rata-rata UMKM, juga sudah mengeluh, karena nggak ada orderan lagi.” ungkapnya. (eri/amd/wa)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005